



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Sindo

Pemda Diminta Paksa Masyarakat Gunakan Angkutan Umum

KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) meminta pemerintah daerah (pemda) di Jabodetabek menerbitkan aturan yang memaksa masyarakat menggunakan angkutan umum. Hal tersebut untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya yang menyebabkan kemacetan.

"Kita lagi dorong Jabodetabek ini bagaimana pemerintah daerahnya punya program dan regulasi yang sedikit banyak membuat masyarakat mau tidak mau memilih kendaraan umum daripada pribadi," ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati belum lama ini.

Menurut Adita, kemacetan yang selama ini terjadi karena masih banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum. Padahal, transportasi umum di Jabodetabek sudah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, Adita juga meminta pemda untuk meningkatkan intermoda transportasi di wilayahnya.

Selama ini masalah tersebut terjadi karena kurangnya integrasi intermoda. "Kami lakukan integrasi intermoda karena salah satu kendalanya adalah begitu kendaraan massal turun dari situ ke *last mile*, atau *first mile*-nya belum terlalu baik. Dan ini yang juga kita dorong pada pemda, bagaimana caranya bisa membuat satu integrasi yang baik dari *first mile* dan *last mile*," katanya.

Adita menekankan, masalah kemacetan ini tidak bisa diselesaikan hanya pada pemerintah pusat, tapi juga harus dibarengi kebijakan pemerintah daerah. "Kami tidak mungkin kerja sendiri di pemerintah pusat ya, kami juga harus meminta pemerintah daerah untuk

sama-sama proaktiflah untuk melakukan itu," desaknya.

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menilai kemacetan di Jakarta karena pelayanan transportasi umum masih kurang baik. Berbeda jika dibandingkan negara-negara tetangga. "Kemacetan di Jakarta karena masyarakatnya masih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum. Di negara maju, warganya cenderung menggunakan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi," ujar Hardiyanto.

Padatnyanya kendaraan di jalan menjadi pemicu kemacetan. Belum lagi ditambah proyek konstruksi jalan, kecelakaan lalu lintas, serta faktor cuaca. Padahal, saat ini moda transportasi publik yang tersedia di Jakarta sudah semakin beragam, dari Transjakarta, KRL Commuterline, hingga MRT.

Namun, Pemprov DKI terkesan tidak mampu menaikkan minat masyarakatnya beralih untuk naik transportasi umum. "Pencabutan PPKM di Jakarta ini sangat berdampak sekali terhadap peningkatan mobilitas masyarakat. Seharusnya sarana transportasi publik diperluas cakupan rutennya. Lalu kualitas kenyamanan juga harus ditingkatkan untuk menarik minat masyarakat menggunakan transportasi publik," ucapnya.

Hardiyanto menemukan fakta di lapangan bahwa pelayanan transportasi umum masih belum memadai dan maksimal. Menurut anggota Komisi D DPRD DKI itu, penanganan kemacetan tidak hanya cukup perbaikan fasilitas dan regulasi yang mendukung di Jakarta saja, akan tetapi juga diperlukan kerja sama antardaerah di kawasan penyangga. "Pemprov DKI harus bekerja sama dan

membangun komunikasi dengan pemda-pemda di kawasan penyangga untuk menangani masalah ini. Buang segala macam ego sektoral sehingga bersama-sama bisa membuat satu formula yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan macet," terangnya.

Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Haris Muhammadun menilai, sudah banyak program pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi macet yang berhubungan dengan kepemilikan kendaraan. Pemprov DKI Jakarta, misalnya, sedang menyusun rancangan perda untuk syarat kepemilikan garasi bagi pemilik kendaraan pribadi. "Hal ini menjadi salah satu cara membatasi masyarakat memiliki mobil banyak karena banyak warga di Jakarta dan daerah penyangga memiliki mobil lebih dari satu dan di parkir di jalan.

Ini jelas mengganggu lingkungan sekitar dan juga membuat jalanan semakin ramai," ungkapnya.

Cara lainnya memberlakukan batas usia maksimum kendaraan. Ide ini dulu pernah dikemukakan Pemprov DKI Jakarta, tetapi ditentang. Pembatasan tersebut harus segera dilakukan karena masyarakat yang memiliki mobil banyak dikenai pajak yang tidak terlalu berat, banyak yang bisa menyalahi hal tersebut. "Jika di luar negeri orang yang ingin memiliki kendaraan harus memiliki sertifikat. Salah satunya syaratnya memiliki garasi, mampu bayar parkir karena tarif parkir tinggi, taat membayar pajak dan ada surat pernyataan usia kendaraan tertentu sudah tidak dapat dipakai kembali," ungkapnya.

Menurut Haris, sejumlah program pemerintah belum

berhasil karena belum ada konsistensi semua pihak untuk merawat kebijakan *push and pull policy*. Misalnya, angkutan umum direvitalisasi dan dibuat bagus. Lalu tarif dibuat terintegrasi, fasilitas integrasi antar angkutan juga dibuat nyaman.

Peraturan ganjil genap pun diawasi oleh masyarakat dengan membeli mobil lebih dari satu dengan nomor ganjil dan genap dan dipakai bergantian. Jalan berbayar juga perlu dikomunikasikan yang baik kepada masyarakat. "ERP itu bukan pajak atau retribusi tetapi kompensasi bagi penyumbang kemacetan. Dia berkontribusi terhadap kemacetan. Strategi komunikasi harus bagus karena menyadarkan masyarakat itu tidak mudah. Tujuannya harus dikomunikasikan dengan baik," ujarnya.

■ **faorickpapakhan/sabir laluhu/anandanararya**